

Vol. 6 No.1 Desember 2013 (17-22)

<http://dx.doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.277>**Jurnal Pelangi**Website: ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi**TUJUAN OTONOMI DAERAH DAN ALASAN PEMEKARAN WILAYAH****Elvawati¹⁾**¹⁾STKIP PGRI Sumatera Baratelvawatie@yahoo.com**INFO ARTIKEL**

Diterima :

Disetujui :

Kata Kunci:

***Otonomi Daerah,
Pemerintahan*****Abstrak**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan undang-undang. Tujuan otonomi daerah berdasarkan UU no. 5 1975 adalah untuk memungkinkan daerah terkait untuk mengontrol dan mengelola urusan daerah mereka sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dalam konteks pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan perkembangan stabilitas politik dan persatuan nasional.

Abstract

Regional autonomy is the right, authority, and duties of the autonomous regions to organize and manage their own affairs and interests of local communities in accordance with the legislation. The purpose of regional autonomy under Law no. 5 1975 is to allow the relevant area to control and manage their own households to improve the effectiveness and efficiency of government administration in the context of service to the community and implementation. Increase the effectiveness and efficiency of regional government, especially in the implementation of development and service to the community and to improve peminanan political stability and national unity.

Keywords:

***Regional
Autonomy,
Government*****PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia sebagai
Negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan memberikan

ISSN: 2085-1057

E-ISSN: 2460-3740

kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-undang (Dedy,2003).

Aspek penting dari reformasi yang kita rasakan hingga saat ini adalah munculnya otonomi dan undang-undang otonomi daerah diakhir tahun 1990-an sehingga mengakibatkan terjadinya pemekaran wilayah. Bergulirnya tuntutan pemekaran wilayah di Indonesia dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tingkat desa atau nagari. Diberlakukanya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan wilayah. Dalam pasal 6 ayat 1 dan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapuskan dan digabungkan dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah (Irdam,2006).

UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah. UU No. 34 dan 33 tahun 2004 muncul akibat UU No. 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Akibat keluarnya UU otonomi daerah, banyak daerah yang menginginkan pemisahan dengan daerah induknya dengan berbagai alasan.

METODE PENELITIAN

Berangkat dari fenomena diatas maka dari literatur yang ada ditemukan beberapa tujuan otonomi daerah dan alasan pemekaran wilayah. Otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dinegara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Kewenangan daerah menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa: “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lain”. Kewenangan bidang lain sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana pembangunan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Pada UU No. 22 tahun 1999 diberikan wewenang yang luas kepada daerah. Kewenangan daerah tersebut mencakup semua kewenangan yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pengertian otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 34 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 berbunyi otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah didistorsikan sebagai persoalan penyerahan urusan atau pelimpahan kewewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi wacana otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan menjadi wewenang rumah tangga daerah. Instrument politik, administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari otonomi daerah menurut UU No. 5 tahun 1975 adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah butir (b) dan (c) dapat memberikan gambaran tentang tujuan Otonomi Daerah. Isi kedua butir menimbang ini adalah seperti berikut:

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sedangkan ketentuan pemekaran wilayah juga ditentukan dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999 yaitu daerah dapat dimekarkan lebih dari satu, dimana pemekaran berasal dari kata mekar yang berarti berkembang dan “an” menjadi pemekaran. Jadi pemekaran daerah adalah pemecahan suatu daerah untuk dikembangkan menjadi dua atau lebih untuk melaksanakan pemerintah daerah

sesuai dengan kriteria perundang-undangan dan peraturan. Tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Pemerintahan daerah menurut UU No. 34 tahun 2004 pada pasal 2 ayat 2 adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantu.

Sedangkan menurut Simalungum ada tiga tujuan otonomi yaitu (1). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, (2). Mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada di daerah sendiri, (3). Meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu tujuan dari otonomi daerah adalah: Menciptakan kemandirian, . Meningkatkan pelayanan public. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Alasan Pemekaran Wilayah

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya diciptakan dalam acuan interaksi sosial karena interaksi sebagai mekanisme yang menggerakkan perubahan (Laver, 1993), perubahan terjadi akibat adanya perubahan dalam struktur sosial, aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai disintegrasi . Otonomi daerah muncul merupakan akibat adanya perubahan yaitu adanya reformasi sehingga dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 yang mengakibatkan munculnya pemekaran-pemekaran (Bratakusuma, 2003). UU No.22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi UU No.34 tahun 2004 yang bertujuan untuk menyempurnakan UU No 22 tahun 1999.

Adapun alasan-alasan daerah melakukan pemekaran menurut Mubyarto adalah:

1. Pemerintah lebih mengedepankan sentralisasi atau pusat
2. Adanya faktor ketidakadilan dimana daerah yang sumber daya alam banyak

tetapi tidak bisa menikmati hasil karena dimonopoli oleh pusat.

Sedangkan menurut sudantoko (2003) dalam bukunya alasan daerah untuk melakukan pemekaran adalah:

1. Akibat kesenjangan pendapat antara daerah-daerah besar.
2. Akibat kesenjangan investasi.
3. Pendapatan daerah dikuasai pusat.
4. Pemusatan industry akibat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur yang terpusat.
5. Melebar kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh elvawati tahun 2008, adapun alasan-alasan elit-elit lokal mengupayakan pemekaran wilayah adalah:

1. Diabaikan oleh pemerintah. Menurut Marzuki (2003), secara prinsip kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada suatu pemerintah daerah dimaksud untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok-pokok pemerintahan yang menyangkut pelayanan atau service. Pelayanan berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat artinya siapapun dalam masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang kedudukan orang-orang tersebut baik kaya atau miskin. Oleh sebab itu dalam pemerintahan daerah, pemerintah tidak boleh mengabaikan pelayanan kepada siapapun baik daerah yang kaya dari segi sumber daya alamnya maupun ekonominya dengan daerah yang miskin ekonominya maupun sumber daya alamnya. karena salah satu alasan daerah melakukan pemekaran karena kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang disebabkan oleh terlalu banyak daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah. Salah satu alasan

daerah memekarkan wilayahnya adalah dengan tujuan untuk mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah nagari maupun daerah karena selama ini jarak antara nagari dengan jorong jauh ataupun jarak antara nagari dengan kecamatan jauh sehingga untuk berurusan ke kantor nagari, kantor camat maupun kabupaten memakan waktu lama dan biaya yang mahal dengan urusan tidak bisa selesai dalam satu hari.

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alasan ketiga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun pembangunan. Karena kalau daerah bisa memekarkan diri maka akan mendapatkan dana alokasi umum (DAU). Sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan daerah apakah itu nagari ataupun kecamatan. Selain itu dengan adanya pemekaran didaerah tersebut akan bisa merekrut tenaga kerja untuk mengisi posisi yang kosong didaerah pemekaran.
4. Adanya desakan dari masyarakat. Menurut Josef, penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas adanya partisipasi aktif anggota masyarakat baik sebagai kesatuan system maupun

sebagai individu. Tujuan dari pemekaran ini adalah masyarakat menginginkan kemajuan, karena masyarakat sudah mengetahui keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan adanya pemekaran.

5. Sumber daya alam yang banyak tetapi tidak dapat dinikmati. Salah satu pemicu upaya pemekaran adalah daerah memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi masyarakat daerah tersebut tidak pernah menikmati hasil sumber daya alam yang ada didaerahnya. Sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat karena tidak bisa menikmati hasil daerahnya sendiri.
6. Daerah luas, penduduk banyak dan sarana prasarana lengkap. Keinginan daerah untuk memekarkan diri selain sumber daya alam yang melimpah juga disebabkan oleh daerah mereka yang luas sesuai dengan syarat pemekaran daerah atau aturan pemerintah tentang pemekaran. Daerah yang luas juga didukung oleh penduduk yang banyak serta sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan syarat pemekaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan wilayah. Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah a) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, b) mempunyai hak untuk menggali sumber dana yang ada didaerah sendiri, c) meningkatkan sumber daya manusia, d) menciptakan

kemandirian, e) meningkatkan pelayanan public, f) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Akibat keluarnya UU otonomi daerah, banyak daerah yang menginginkan pemisahan dengan daerah induknya dengan berbagai alasan: (1). Akibat kesenjangan pendapat antara daerah daerah besar, (2) Akibat kesenjangan investasi, (3) Pendapatan daerah dikuasai pusat, (4) Pemusatan industry akibat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur yang terpusat, (5). Melebar kesenjangan

regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit, (6). Diabaikan oleh pusat, (7). Mempermudah urusan masyarakat dengan pemerintah, (8). Partispasi masyarakat, (9). Meningkatkan kesejahteraan rakyat, (10). Daerah luas, penduduk banyak, dan sarana prasarana lengkap.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian terselenggara atas bantuan yayasan PGRI Padang yang telah memberikan dana dalam penelitian ini.

DAFTARPUSTAKA

Brataku Sumah, Solihin. (2003). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Elvawati. (2008). *Alasan Elit-elit Lokal Mengupayakan Pemekaran Wilayah Studi Kenagarian Salayo Kecamatan Kubung kabupaten Solok*. Padang. Skripsi Universitas Andalas.

Huri, irdam. (2006). *Strategi nagari mempertahankan keutuhan wilayah dan pemerintahannya dari upaya pemekaran wilayah*. Padang. Tesis Universitas Andalas.

Kalaloh. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Laver, H Robert. 1993. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta

Pamungkas, Sri bintang. (2001). *Dari orde baru keIndonesia baru lewat reformasi total*. Jakarta. Rajawali Press.

Sudantako, Djoko. (2003). *Dilema Otonomi daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salam, D setiawan. (2007). *Otonomi daerah dalam prespektif lingkungan, nilai, dan sumber daya*. Jakarta. Djabatan.

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 (Tahun 1999) *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 5 (Tahun 1974) *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 34 (Tahun 2004) *Tentang Pemerintahan Daerah*